Journal of Community Development and Empowerment
Vol. 2 No. 3, May 2026, pp. 66-72
E-ISSN 3089-4484

Di Balik Gemerlap Pariwisata: Upaya Komunitas Adat Bali Menjaga Eksistensi Subak sebagai Warisan Dunia

Deviana Rahayu [1*], Sandi Kusuma [2]
[1, 2] Program Studi Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram Indonesia
* Corresponding author: Rahayu01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received : May 8, 2026
Revised : May 18, 2026
Accepted : May 27, 2026
Published : May 29, 2026

Keywords
Subak,
Indigenous Communities,
World Heritage,
Bali Tourism,
Cultural Sustainability.

License by CC-BY-SA
Copyright © 2025, The Author(s).

ABSTRACT

The Subak system in Bali, which has been recognized as a UNESCO World Heritage site, is currently facing serious threats due to massive land conversion and tourism commercialization. This community service activity aims to strengthen the existence of indigenous communities in maintaining the sustainability of Subak amidst the onslaught of modernization. The method used is Community-Based Development (CBD) through intensive mentoring, water management workshops, and the strengthening of awig-awig (customary regulations) related to agricultural land preservation. The results of the activity show that the active involvement of indigenous communities can increase collective awareness of the importance of maintaining the Tri Hita Karana philosophy as the foundation of Subak. Efforts to digitalize subak land mapping and develop community-based agritourism serve as strategic solutions to improve the economic well-being of farmers without damaging the local ecosystem. Furthermore, collaboration between krama subak (subak members) and policymakers successfully formulated a stricter draft for green zone protection. This community service concludes that empowering local communities is the primary key to maintaining Bali's cultural identity. Through the strengthening of customary institutions, Subak does not merely survive as a visual tourist attraction, but continues to function as a resilient religious-social irrigation system. The success of this program is expected to serve as a model for other regions in managing cultural heritage that intersects with the global tourism industry.

How to cite: Rahayu et al. (2026). Di Balik Gemerlap Pariwisata: Upaya Komunitas Adat Bali Menjaga Eksistensi Subak sebagai Warisan Dunia. *Journal of Community Development and Empowerment, 2(3)*, 66-72. https://doi.org/10.70716/jocdem.v2i3.565

PENDAHULUAN

Bali telah lama dikenal sebagai destinasi pariwisata global yang menawarkan perpaduan unik antara keindahan alam dan kekayaan budaya. Namun, di balik gemerlap industri pelancongan tersebut, terdapat sebuah sistem sosioreligius yang menjadi tulang punggung peradaban agraris Pulau Dewata, yaitu Subak. Subak bukan sekadar sistem irigasi teknis, melainkan manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana yang menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.

Eksistensi Subak telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Pengakuan ini seharusnya menjadi perisai bagi kelestarian bentang alam budaya Bali. Namun, ironinya, status tersebut justru sering kali meningkatkan daya tarik investasi properti yang memicu alih fungsi lahan secara masif. Sawah-sawah yang dulunya merupakan kawasan hijau produktif kini perlahan berubah menjadi deretan vila, hotel, dan restoran demi memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan.

Permasalahan utama yang dihadapi komunitas adat saat ini adalah tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Petani yang tergabung dalam krama subak sering kali menanggung beban pajak bumi dan bangunan yang tinggi di kawasan pariwisata, sementara pendapatan dari sektor pertanian tetap stagnan. Kondisi ini menciptakan disinsentif bagi generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai petani, sehingga mengancam keberlanjutan regenerasi pengelola Subak di masa depan.

Selain masalah lahan, ketersediaan air yang menjadi urat nadi Subak mulai terganggu. Pertumbuhan sarana pariwisata yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya perebutan sumber daya air antara kebutuhan domestik/pariwisata dengan kebutuhan irigasi pertanian. Sering kali, kepentingan komersial lebih diutamakan, sehingga debit air yang mengalir ke hilir sawah semakin berkurang dan mengganggu pola tanam tradisional yang telah terjaga selama berabad-abad.

Komunitas adat Bali, melalui lembaga Desa Adat dan Subak, sebenarnya memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya melalui Awig-awig atau aturan adat. Namun, kekuatan aturan ini kerap berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui sektor pariwisata. Lemahnya sinergi antara kebijakan makro dan kearifan lokal menciptakan celah bagi eksploitasi lahan yang tidak terkontrol.

Penting untuk disadari bahwa hilangnya Subak bukan hanya berarti hilangnya produktivitas beras, melainkan runtuhnya fondasi identitas budaya Bali. Upacara keagamaan yang berkaitan dengan siklus pertanian, seperti Mapag Toya atau Ngusaba Desa, akan kehilangan relevansinya jika sawah-sawah itu hilang. Dengan kata lain, pariwisata Bali sedang menghancurkan aset utama yang sebenarnya ingin dilihat oleh para wisatawan itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang konkret untuk memperkuat posisi tawar komunitas adat. Pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan Community Based Development. Fokus utamanya adalah mengedukasi masyarakat mengenai nilai strategis Subak sebagai aset jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada keuntungan instan dari penjualan lahan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan konsep agrowisata berbasis komunitas. Dalam model ini, komunitas adat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemegang kendali utama atas pengelolaan wisatanya. Wisatawan diajak untuk merasakan pengalaman bertani secara langsung, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani tanpa harus mengonversi lahan sawah menjadi bangunan permanen.

Selain aspek ekonomi, penguatan aspek legal-adat menjadi sangat krusial. Pendampingan dalam merevisi Awig-awig agar lebih relevan dengan tantangan zaman modern diperlukan agar komunitas memiliki payung hukum yang kuat dalam menolak pembangunan yang merusak ekosistem Subak. Hal ini mencakup kesepakatan kolektif untuk tidak menjual lahan kepada pihak luar secara sembarangan.

Digitalisasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya penjagaan ini. Pemetaan lahan Subak berbasis GIS (Geographic Information System) membantu komunitas dalam memantau setiap jengkal tanah mereka dari ancaman alih fungsi. Dengan data yang akurat, masyarakat adat dapat memberikan laporan yang valid kepada pemerintah jika terjadi pelanggaran tata ruang di wilayah mereka.

Peran pemuda adat dalam organisasi Sekaa Teruna Teruni juga perlu dioptimalkan. Mereka adalah jembatan antara teknologi modern dan tradisi luhur. Dengan melibatkan generasi muda dalam pengelolaan Subak melalui inovasi teknologi pertanian dan pemasaran produk organik, citra petani yang dianggap "kuno" dapat bertransformasi menjadi profesi yang prestisius dan menjanjikan.

Namun, upaya dari dalam komunitas saja tidak cukup. Diperlukan advokasi yang kuat kepada pemerintah daerah agar memberikan insentif khusus bagi para penjaga Subak. Insentif ini bisa berupa subsidi pupuk, pembebasan pajak lahan pertanian, hingga perlindungan sumber mata air dari eksploitasi komersial berlebihan oleh industri perhotelan.

Kegiatan pengabdian ini juga menekankan pada pentingnya dialog antar-stakeholder. Mempertemukan pelaku pariwisata, pemerintah, dan krama subak dalam satu meja diskusi bertujuan untuk menciptakan kesepahaman bahwa keberlanjutan pariwisata Bali sangat bergantung pada kelestarian Subak. Jika Subak runtuh, maka daya tarik magis Bali sebagai destinasi budaya juga akan ikut memudar.

Secara filosofis, perjuangan menjaga Subak adalah bentuk implementasi nyata dari menjaga Palemahan (lingkungan) dan Pawongan (hubungan antarmanusia). Upaya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan dan mendekomodifikasi nilai-nilai luhur menjadi sekadar barang dagangan. Komunitas adat Bali harus tetap menjadi subjek, bukan objek, di tanah kelahirannya sendiri.

Melalui program pengabdian ini, diharapkan muncul model tata kelola Subak yang tangguh dan adaptif. Keberhasilan dalam menjaga eksistensi Subak di tengah gemerlap pariwisata akan menjadi bukti bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan asalkan ada keberpihakan yang jelas terhadap kelestarian lingkungan dan kedaulatan masyarakat adat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Community Based Development (CBD) yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Tahap awal pelaksanaan dimulai dengan melakukan identifikasi masalah dan pemetaan sosial (social mapping) secara mendalam di kawasan Subak yang menjadi mitra program. Tim pelaksana melakukan observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan para Pekaseh (ketua subak) serta

tokoh masyarakat adat untuk memahami sejauh mana tekanan pariwisata telah memengaruhi integritas lahan dan sistem irigasi di wilayah tersebut. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar teori akademis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap Awig-awig yang sudah ada untuk melihat celah regulasi lokal yang perlu diperkuat guna memitigasi risiko alih fungsi lahan yang terus meningkat akibat permintaan lahan untuk fasilitas pariwisata.

Tahap kedua berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui rangkaian workshop dan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion). Dalam fase ini, tim pengabdian memberikan pendampingan teknis mengenai tata kelola air yang efisien di tengah keterbatasan debit air yang sering kali tersedot oleh kebutuhan industri perhotelan. Workshop ini juga mencakup pelatihan manajerial bagi pengurus Subak dalam mengelola organisasi secara lebih modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah strategi negosiasi dan diplomasi budaya bagi masyarakat adat saat berhadapan dengan pengembang properti maupun pemerintah daerah. Melalui diskusi ini, masyarakat diajak untuk merumuskan kembali visi pelestarian Subak yang tidak hanya berorientasi pada aspek estetika sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai ketahanan pangan dan warisan spiritual yang harus dipertahankan secara kolektif.

Fase implementasi teknis dilakukan melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi dan ekonomi kreatif, yakni digitalisasi pemetaan lahan serta perancangan model agrowisata berbasis komunitas. Tim pengabdian membantu krama subak dalam mengoperasikan perangkat pemetaan sederhana berbasis GPS untuk mendokumentasikan batas-batas wilayah subak secara digital, sehingga setiap perubahan fungsi lahan dapat terpantau secara akurat dan cepat. Secara paralel, dilakukan pendampingan dalam merancang paket wisata edukasi pertanian yang ramah lingkungan, di mana para petani dilatih untuk menjadi pemandu wisata lokal (local guide) yang mampu menjelaskan filosofi Tri Hita Karana kepada wisatawan. Dengan adanya diversifikasi pendapatan dari sektor agrowisata ini, diharapkan ketergantungan ekonomi petani terhadap penjualan lahan dapat dikurangi secara signifikan, karena lahan sawah yang produktif kini memiliki nilai ekonomi ganda baik sebagai lahan pangan maupun sebagai daya tarik wisata edukasi.

Tahap terakhir dari metode pelaksanaan ini adalah monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program melalui kuesioner tingkat kesadaran masyarakat serta pemantauan luas lahan sawah yang berhasil diproteksi selama masa pengabdian. Tim juga memfasilitasi pertemuan antara komunitas adat dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dari unsur pemerintah kabupaten dan pelaku industri pariwisata untuk menyosialisasikan draf penguatan aturan adat yang telah disusun. Output akhir dari tahap ini adalah terciptanya sebuah nota kesepahaman lokal atau komitmen bersama dalam menjaga kawasan hijau Subak sebagai zona inti warisan budaya. Keberlanjutan program dijamin melalui pembentukan kader konservasi muda dari unsur Sekaa Teruna Teruni yang akan bertugas menjaga dan meneruskan sistem proteksi Subak ini secara mandiri di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap pemetaan sosial yang mengungkap fakta bahwa tekanan terhadap eksistensi Subak di wilayah mitra telah mencapai titik kritis. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa penetrasi infrastruktur pariwisata telah memicu fragmentasi lahan yang cukup parah, di mana akses jalan menuju hotel atau vila baru sering kali memutus saluran irigasi tradisional. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa lebih dari 60% krama subak merasa terdesak secara ekonomi akibat tingginya nilai jual objek pajak (NJOP) yang tidak sebanding dengan hasil panen. Kondisi ini menjadi temuan dasar bahwa ancaman terhadap Subak bukan hanya bersifat fisik, melainkan struktural-ekonomis. Melalui pendekatan partisipatif, tim berhasil memetakan titik-titik rawan alih fungsi lahan yang selama ini luput dari pengawasan otoritas terkait, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi proteksi berbasis adat.

Pembahasan mengenai penguatan kelembagaan melalui revitalisasi Awig-awig (aturan adat) menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap soliditas komunitas. Melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD), masyarakat adat berhasil merumuskan poin-poin baru dalam aturan mereka yang secara spesifik melarang penjualan lahan kepada pihak luar kecuali untuk kepentingan sesama anggota komunitas atau kepentingan sosial keagamaan. Hal ini merupakan bentuk "perlawanan halus" namun legal

secara adat terhadap gempuran modal besar. Pembahasan teknis mengenai aturan ini mengungkap bahwa keberadaan sanksi adat (kasepekang) masih menjadi instrumen kontrol sosial yang paling efektif dibandingkan regulasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam hukum adat, komunitas memiliki payung hukum mandiri yang lebih ditaati oleh warga lokal karena memiliki keterikatan spiritual.

Hasil dari workshop tata kelola air menunjukkan adanya peningkatan efisiensi distribusi irigasi di tingkat hilir. Sebelumnya, sering terjadi konflik horizontal antarpetani karena debit air yang berkurang akibat pembangunan sumur bor oleh akomodasi wisata di hulu. Melalui pendampingan teknis, tim pengabdian memperkenalkan kembali sistem tektek (pembagian air proporsional) yang diperkuat dengan pemantauan berbasis digital. Pembahasan dalam sesi ini menekankan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan filosofi, melainkan memperkuatnya. Dengan penggunaan alat ukur debit yang sederhana namun akurat, para Pekaseh kini memiliki data yang kuat untuk bernegosiasi dengan pihak hotel atau pemerintah jika terjadi penyusutan air yang tidak wajar. Hal ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas teknis sangat krusial agar komunitas adat memiliki posisi tawar yang setara dalam sengketa sumber daya alam.

Dalam aspek ekonomi kreatif, pengembangan model agrowisata berbasis komunitas telah memberikan dampak langsung pada pendapatan tambahan petani. Berdasarkan evaluasi setelah implementasi, terdapat peningkatan pendapatan rata-rata anggota subak sebesar 20% yang berasal dari paket wisata edukasi "Sehari Menjadi Petani". Wisatawan tidak hanya melihat pemandangan, tetapi terlibat dalam proses menanam padi, memperbaiki pematang, hingga memahami ritual keagamaan di pura subak. Pembahasan mengenai capaian ini menunjukkan bahwa transisi dari pariwisata massal ke pariwisata minat khusus (edukasi) adalah solusi yang paling berkelanjutan. Model ini membuktikan bahwa lahan sawah tetap dapat memberikan keuntungan ekonomi tinggi tanpa harus dikonversi menjadi bangunan beton, sehingga mematahkan argumen bahwa pertanian di Bali sudah tidak lagi menguntungkan secara finansial.

Digitalisasi pemetaan lahan menggunakan sistem informasi geografis (GIS) sederhana menjadi terobosan yang paling diapresiasi oleh generasi muda di desa. Hasil pemetaan digital ini menghasilkan "Peta Hijau Subak" yang mencakup koordinat presisi setiap petak sawah dan saluran air. Pembahasan dalam konteks ini menyoroti peran strategis Sekaa Teruna Teruni (pemuda adat) yang kini menjadi garda terdepan dalam pengawasan lahan. Mereka menggunakan aplikasi di smartphone untuk mendokumentasikan setiap indikasi pembangunan ilegal di kawasan hijau. Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital ini menciptakan sistem peringatan dini yang efektif. Jika ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, data koordinat dan foto lapangan dapat langsung dilaporkan secara kolektif kepada Dinas Perizinan dan Majelis Desa Adat, sehingga mempersempit ruang gerak spekulan tanah.

Dampak psikososial dari program ini terlihat pada tumbuhnya kembali rasa bangga (sense of pride) di kalangan petani, khususnya generasi muda. Sebelum pengabdian dilakukan, profesi petani sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah. Namun, melalui kampanye "Subak sebagai Identitas Dunia", persepsi tersebut mulai bergeser. Pembahasan hasil wawancara mendalam mengungkapkan bahwa para pemuda mulai melihat potensi bisnis di sektor pertanian organik dan manajemen pariwisata berbasis budaya. Kebanggaan ini menjadi modal sosial yang sangat mahal harganya, karena keberlanjutan Subak sangat bergantung pada kemauan generasi penerus untuk tetap mengolah tanah. Tanpa adanya regenerasi petani, pengakuan UNESCO hanya akan menjadi label kosong yang menempel pada lahan yang sudah mati secara fungsi.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai sinergi antara komunitas adat dan pemerintah daerah menunjukkan dinamika yang kompleks namun produktif. Melalui forum dialog yang difasilitasi tim pengabdian, tercapai kesepahaman mengenai pentingnya insentif pajak bagi lahan subak yang berada di zona penyangga pariwisata. Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan skema subsidi khusus bagi petani yang berkomitmen tidak mengalihfungsikan lahannya selama kurun waktu tertentu. Hasil ini menunjukkan bahwa peran akademisi sebagai jembatan (bridge maker) sangat diperlukan untuk memecahkan kebuntuan komunikasi antara kebijakan top-down dan aspirasi bottom-up. Dialog ini juga berhasil mendorong lahirnya draf Peraturan Desa yang memperkuat posisi Subak dalam rencana tata ruang wilayah desa, memberikan proteksi berlapis selain aturan adat yang sudah ada.

Aspek spiritual tetap menjadi inti dari seluruh pembahasan mengenai kelestarian Subak. Hasil observasi selama upacara Ngusaba Desa menunjukkan bahwa keterikatan batin masyarakat terhadap lahan sawah masih sangat kuat karena nilai sakralitasnya. Program pengabdian ini berhasil memperkuat narasi

bahwa merusak Subak sama dengan merusak tatanan hubungan dengan Tuhan. Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa pendekatan konservasi di Bali tidak bisa dilepaskan dari dimensi religius. Ketahanan Subak di tengah gemerlap pariwisata justru terletak pada kemampuannya menjaga "jiwa" lahan tersebut melalui ritual harian dan musiman. Ketika sebuah petak sawah dipandang sebagai tempat tinggal para dewa, maka dorongan untuk menjualnya demi kepentingan materialistik akan mendapatkan hambatan moral yang sangat besar dari dalam diri individu itu sendiri.

Efektivitas metode Community Based Development (CBD) dalam program ini teruji melalui kemandirian komunitas dalam mengelola unit agrowisatanya sendiri. Setelah pendampingan intensif selama enam bulan, krama subak mampu membentuk badan pengelola yang profesional dengan sistem pembagian hasil yang transparan. Pembahasan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang adil menjadi kunci utama rendahnya konflik internal. Sebagian dari pendapatan wisata dialokasikan untuk biaya pemeliharaan pura dan saluran irigasi bersama, sehingga beban iuran rutin petani menjadi berkurang. Hal ini menciptakan siklus ekonomi sirkular di mana pariwisata membiayai kelestarian budaya, dan budaya yang lestari menarik minat pariwisata berkualitas.

Pembahasan mengenai tantangan eksternal menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi dan gaya hidup modern tetap menjadi variabel yang sulit dikontrol sepenuhnya. Meskipun program ini berhasil di satu wilayah, ancaman dari wilayah sekitar yang tidak memiliki proteksi serupa tetap ada melalui efek domino pembangunan. Oleh karena itu, hasil pengabdian ini menekankan pentingnya pembentukan "Aliansi Antar-Subak" untuk menciptakan kawasan proteksi yang lebih luas. Pembahasan mengenai kerjasama lintas wilayah ini menjadi rekomendasi penting agar perlindungan Subak tidak bersifat parsial atau terkotak-kotak dalam satu desa saja. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa sistem air Subak adalah satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung dari gunung hingga ke laut.

Dalam konteks lingkungan, penggunaan teknik pertanian organik yang diperkenalkan selama pengabdian memberikan hasil berupa perbaikan kualitas tanah dan kembalinya keanekaragaman hayati lokal seperti belut, katak, dan capung yang sempat menghilang akibat penggunaan pestisida kimia berlebihan. Pembahasan hasil laboratorium tanah secara sederhana menunjukkan peningkatan kadar bahan organik lahan. Hal ini membuktikan bahwa menjaga Subak juga berarti menjaga kesehatan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem air bawah tanah Bali. Pertanian organik menjadi nilai tambah yang sangat tinggi dalam pemasaran produk agrowisata, di mana wisatawan bersedia membayar lebih mahal untuk mengonsumsi produk yang dihasilkan dari lahan yang dikelola secara lestari dan penuh nilai spiritual.

Secara teoritis, hasil pengabdian ini mendukung konsep "Resiliensi Budaya" di mana sebuah komunitas tradisional mampu beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan jati dirinya. Pembahasan ini menolak tesis bahwa pariwisata pasti akan menghancurkan tradisi. Sebaliknya, jika dikelola dengan prinsip keadilan dan berbasis pada kedaulatan masyarakat adat, pariwisata dapat menjadi katalisator bagi revitalisasi budaya. Subak di Bali telah membuktikan diri sebagai sistem yang resilien selama lebih dari seribu tahun, dan upaya pengabdian ini hanyalah pemantik untuk mengaktifkan kembali mekanisme pertahanan internal yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat tersebut melalui penguatan struktur dan fungsi organisasinya.

Hasil pemantauan terhadap kepatuhan krama subak terhadap draf aturan baru menunjukkan tingkat kepatuhan yang mencapai 95%. Hal ini dikarenakan proses penyusunan aturan dilakukan secara partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up), sehingga setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankannya. Pembahasan mengenai kepatuhan ini menegaskan bahwa sosialisasi yang hanya bersifat satu arah tidak akan efektif dalam masyarakat komunal. Dibutuhkan proses musyawarah (paruman) yang mendalam untuk mencapai konsensus yang kuat. Keberhasilan dalam memproteksi lahan sawah seluas puluhan hektar dari incaran investor selama masa pengabdian menjadi bukti nyata bahwa kekuatan kolektif masyarakat adat jauh lebih efektif daripada pagar beton manapun.

Rekomendasi yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah perlunya standarisasi "Ekolabel Subak" untuk produk-produk pertanian dan jasa wisata yang dihasilkan. Pembahasan mengenai standarisasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas bagi konsumen dan nilai prestise bagi produsen. Dengan adanya label ini, konsumen atau wisatawan secara sadar mengetahui bahwa sebagian dari uang yang mereka keluarkan digunakan langsung untuk menjaga kelestarian warisan dunia UNESCO. Ini adalah bentuk kompensasi jasa lingkungan yang konkret. Hasil ini diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah provinsi sebagai kebijakan daerah yang lebih luas untuk melindungi seluruh sistem Subak di Bali yang tersisa.

Sebagai penutup bagian pembahasan, dapat ditegaskan bahwa upaya menjaga eksistensi Subak di tengah gemerlap pariwisata adalah sebuah perjuangan berkelanjutan yang memerlukan nafas panjang. Hasil pengabdian ini memberikan optimisme bahwa dengan sentuhan inovasi, teknologi tepat guna, dan komitmen moral yang kuat, komunitas adat mampu berdiri tegak menghadapi arus modernisasi. Subak tidak boleh hanya berakhir sebagai museum terbuka bagi para turis, tetapi harus tetap menjadi ruang hidup yang produktif bagi para petani. Keseimbangan antara profitabilitas ekonomi dan kelestarian identitas adalah kunci utama agar Bali tidak kehilangan jiwanya di bawah bayang-bayang kejayaan industrinya sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa eksistensi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dapat dipertahankan di tengah masifnya tekanan pariwisata melalui penguatan kedaulatan masyarakat adat. Pendekatan Community Based Development (CBD) terbukti efektif dalam mentransformasi peran komunitas dari sekadar objek pemandangan menjadi subjek aktif yang mengendalikan tata ruang dan sumber daya air mereka sendiri. Revitalisasi Awig-awig yang mengintegrasikan sanksi adat dengan perlindungan lahan pertanian telah menciptakan benteng hukum yang kokoh terhadap ancaman alih fungsi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal, jika dikelola secara partisipatif, memiliki kekuatan kontrol sosial yang jauh lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan regulasi pemerintah yang bersifat top-down.

Integrasi teknologi digital dan inovasi ekonomi melalui agrowisata berbasis komunitas menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan ekonomi petani. Digitalisasi pemetaan lahan telah memberikan alat pengawasan yang akurat bagi generasi muda, sementara diversifikasi pendapatan dari sektor wisata edukasi telah meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merusak integritas lingkungan sawah. Hasil pembahasan menegaskan bahwa nilai ekonomi ganda dari lahan Subak—sebagai penghasil pangan dan penyedia jasa lingkungan—mampu mengurangi keinginan petani untuk menjual lahan kepada investor properti. Keberhasilan ini mematahkan stigma bahwa sektor pertanian tidak lagi kompetitif di tengah industri pariwisata modern, asalkan dikelola dengan manajemen yang adaptif dan kreatif.

Secara filosofis dan sosiologis, pengabdian ini menegaskan bahwa kelestarian Subak adalah kunci utama bagi ketahanan identitas budaya Bali. Upaya menjaga sistem irigasi ini bukan hanya tentang mempertahankan produktivitas padi, melainkan menjaga harmoni ritual dan hubungan spiritual berdasarkan prinsip Tri Hita Karana. Kolaborasi yang tercipta antara komunitas adat, akademisi, dan pemerintah daerah harus terus dijaga agar program ini memiliki keberlanjutan jangka panjang. Sebagai rekomendasi, perlindungan terhadap Subak harus dipandang sebagai investasi peradaban, di mana dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif pajak dan proteksi sumber mata air menjadi mandatori untuk memastikan Bali tidak kehilangan roh budayanya di bawah bayang-bayang eksploitasi pariwisata global.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, S. S. (2015). Pusaka Air: Subak dalam Perubahan Zaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lansing, J. S. (2006). Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali. Princeton: Princeton University Press.

Pitana, I. G. (2012). Subak: Sistem Irigasi Tradisional di Bali yang Mendunia. Denpasar: Pustaka Bali Post.

UNESCO. (2012). Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy. World Heritage Centre.

Windia, W. (2013). Transformasi Sistem Subak: Menghadapi Tantangan Global. Denpasar: Udayana University Press.

Geriya, I. W. (2010). Pariwisata Budaya dan Kebijakan Pelestarian Subak di Bali. Jurnal Budaya Nusantara.

Sutawan, N. (2008). Organisasi dan Manajemen Subak di Bali. Denpasar: Arti Foundation.

Lorenzen, S., & Lorenzen, J. P. (2011). Changing Landscapes: The Impact of Tourism on Balinese Subaks. Journal of Sustainable Tourism.

Suardana, I. W. (2015). Analisis Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kawasan Pariwisata. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Wardana, I. G. K. (2019). Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Subak. Jakarta: Rajawali Pers.

Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Subak Management: Cultural Heritage and Water Governance. Water International Journal.

Putra, I. N. D. (2013). Tourism, Development and Cultural Change in Bali. London: Routledge.

MacRae, G. (2010). Agriculture and Tourism in Bali: The Subak Under Threat. Canberra: Australian National University.

Suriyani, L. D. (2020). Ancaman Pariwisata terhadap Ketahanan Pangan dan Sistem Subak. Jurnal Lingkungan Bali.

Widiawati, K. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pelestarian Warisan Dunia UNESCO. Jurnal Sosial Budaya Universitas Udayana.